



RENCANA KERJA 2026



BKPSDM KABUPATEN SUMENEP



www.bkpsdm.sumenepkab.go.id

**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Sunkatabel, Kompeten,
Cermat, Ayal, Kapadil, Elaborasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi perangkat daerah kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implemementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyusunan rencana kerja ini.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026.

Sumenep, 12 Agustus 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	59
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	67
BAB V PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Strategis	39
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pohon Kinerja	40
Tabel 2.4	Upaya-Upaya Dalam Peningkatan Sistem Merit	41
Tabel 2.5	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumenep.....	50
Tabel 2.6	Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Sumenep	58
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Strategis	65
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Strategis.....	66
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029	68
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2026	71
Tabel 4.4	Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sumenep Tahun 2026	74



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. Persiapan Penyusunan;

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

- 1) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- 2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) Penutup.

c. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

F. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 disusun dengan maksud :

- 1) Menjabarkan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2026.
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah :

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam jangka 1 tahun;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP



HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut diwujudkan dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 40 sub kegiatan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 900.1.15.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra 2021 - 2026. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah ahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	44 Dokumen	80%
5	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
5	03	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		

5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	80%
5	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			69 orang/bln	69 orang/bln	100%	73 orang/bln		
5	03	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan		
5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Laporan	1 Laporan	100%	-		
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
5	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
5	03	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
5	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
5	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen		

5	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	03	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
5	03	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit	1 unit	100%	-		
5	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 unit	10 unit	100%	7 unit		
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%

5	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit		
5	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	65 %	64%	90%	90,00%	100%	90%	90,00%	138%
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	02	2,01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen		
5	03	02	2,01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga		
5	03	02	2,01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

5	03	02	2,01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	02	2,02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1.700 Dokumen	828 Dokumen	49%	1000 Dokumen		
5	03	02	2,02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
5	03	02	2,03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	
5	03	02	2,03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			75 orang	102 orang	136%	75 Orang		
5	03	02	2,03	'0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang		
5	03	02	2,03	0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina			100 orang	101 orang	101%	100 orang		
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%

5	03	02	2,04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5	03	02	2,04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			90 orang	90 orang	100%	60 orang		
5	03	02	2,04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			150 orang	498 orang	332%	150 orang		
5	03	02	2,04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			500 orang	500 orang	100%	700 orang		
5	03	02	2,04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			30 Laporan	20 Laporan	67%	25 Laporan		
5	03	02	2,04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			30 Dokumen	29 Dokumen	37%	25 Dokumen		
5	03	02	2,04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Lapoan		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	50 %	40%	45%	45%	100%	47%	47%	94%
5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi teknis ASN	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	83%

5	04	02	2,01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
5	04	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			20 orang	13 orang	65%	20 orang		
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		

5	04	02	2,02	08	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
---	----	----	------	----	--	---	--	--	-----------	-----------	------	-----------	--	--

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan guna menunjang seluruh pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini diukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 100%. Indikator ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kesekretariatan. Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 Laporan dan realisasi 5 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan capaian kinerja.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 69 orang/bulan dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu serta melakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dengan target 5 Laporan dan realisasi 5 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memproses pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan bahan logistik kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan barang cetak dan penggandaan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 8 dokumen dan realisasi 8 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan penatausahaan arsip dinamis.
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target 1 Unit realisasi 1 Unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena

adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 10 Unit realisasi 10 Unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan peralatan dan mesin lainnya yang mempunyai TKDN.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 13 unit dan realisasi 13 unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemeliharaan gedung kantor.

b) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaian kinerja dengan persentase 100%.

Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- ❖ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan penataan pegawai sesuai ABK Perangkat Daerah, antara lain melalui pemantauan kondisi pada aplikasi e-Formasi, koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pegawai, berdasarkan aplikasi eFormasi, adanya mutasi/promosi ASN yang dinamis, koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam penetapan analisa jabatan dan ABK serta menyusun Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN tepat waktu sesuai dengan jadwal dari Kementerian PAN dan RB.
- ❖ Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini antara lain :
 - 1) Adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024. Dari 1.746 Pelamar yang memenuhi syarat administrasi sejumlah 1.578 orang dan yang tidak memenuhi syarat 168 orang. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah dilaksanakan melalui CAT (Computer Assisted Test). Pelaksanaan seleksi SKD tersebar di beberapa titik lokasi

antara lain Kantor Regional II BKN Surabaya, Prima Jaya Abadi Pamekasan, Aula Universitas Bojonegoro, Balai Serba Guna Kaliwates Jember, Gedung Islamic Center Malang, Kantor Regional IV BKN, Kantor Regional VIII BKN, STMA Trisakti Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Wisma Haji Madiun. Pelaksanaan dimulai tanggal 26 Oktober s/d 10 November 2024. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) sejumlah 90 (sembilan puluh) orang peserta yang tersebar di beberapa Titik Lokasi antara lain Kantor Regional II BKN Surabaya, Prima Jaya Abadi Pamekasan, Aula Universitas Bojonegoro, Balai Serba Guna Kaliwates Jember, Gedung Islamic Center Malang, Hotel Horison Badung, BKN Provinsi Jogjakarta, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Pelaksanaan Seleksi SKB mulai tanggal 14-20 Desember 2024. Pelaksanaan SKD dan SKB berjalan dengan Baik.

2) Selain CPNS, pada tahun 2024 juga dilaksanakan PPPK Periode I untuk Formasi Tenaga Teknis, Guru dan Tenaga Kesehatan. Periode I yang memenuhi syarat Tenaga Teknis sebanyak 448 orang, Guru sebanyak 139 orang dan Tenaga Kesehatan sebanyak 1 orang. Pelaksanaan Tes PPPK mulai tanggal 9-10 Desember 2024 bertempat di Prima Jaya Abadi Pamekasan dan berjalan dengan Baik.

❖ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memproses administrasi pemberhentian pegawai. Tahun 2024 sudah diterbitkan SK Pensiun sebanyak 409 orang, untuk Pensiun Janda/Dua sebanyak 57 orang.

- ❖ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi dengan target 1 Lembaga dan realisasi 1 lembaga sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memfasilitasi lembaga profesi ASN.
- ❖ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyediaan fasilitas informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien melalui website BKPSDM <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id>. Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN).
- ❖ Pengelolaan Data Kepegawaian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola data kepegawaian. Validitas data ASN pada SIMPEG+ telah berhasil mengurangi frekuensi permintaan data ke PD/unit kerja karena pengintegrasian pengelolaan data dan pemanfaatan data telah menjadikannya, sebagai penunjang pengambilan keputusan mutasi kepegawaian. Validitas Peremajaan data pada SAPK telah berhasil mewujudkan Cetak SK CPNS, Kenaikan Pangkat dan usul Pensiun secara online dengan BKN Pusat sejak tahun 2012 yang ditandai dengan adanya barcode pada setiap cetak SKnya dan saat ini SAPK telah berganti menjadi SIASN yang terintegrasi dengan SIMPEG+.

3) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan data secara cepat untuk kebutuhan promosi, mutasi dan rotasi, adanya evaluasi setiap saat yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja (Baperjakat). Tahun 2024 telah dilaksanakan Pelantikan JPT Pratama sebanyak 9 orang, Administrator sebanyak 25 orang, Pengawas dan Fungsional sebanyak 112 orang, Kepala Sekolah dan Pengawas sebanyak 150 orang.
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 1.700 Dokumen dan realisasi 828 Dokumen sehingga capaian kinerja 48%. Sub kegiatan ini tidak tercapai karena Usul Pangkat dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur), berkas tidak lengkap/tidak memenuhi syarat.
- Pengelolaan Promosi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan promosi ASN.

4) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan dengan target 75 orang dan realisasi 102 orang sehingga capaian kinerja 136%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan dengan target 15 orang dan realisasi 15 orang sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan Pemkab Sumenep. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan Diklat Teknis Fungsional dengan Pola Kontribusi/mengirim peserta antara lain Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat Angkatan I dan II Tahun 2024, Diklat Penguatan Tugas-tugas Sekretaris Perangkat Daerah, Pelatihan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun 2024, Diklat Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Bagi UKM Tahun 2024, Diklat Pengembangan Kepribadian dan Perubahan Mindset ASN Tahun 2024, Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar Berbasis Kompetensi, Diklat Pengarustamaan Gender bagi Pemerintah Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah

Angkatan VII tahun 2024, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Angkatan II Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN Fungsional yang Dibina dengan target 100 orang dan realisasi 100 orang sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dilingkungan Pemkab Sumenep.

5) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan penilaian kinerja aparatur dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan dengan target 90 orang dan realisasi 90 orang sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena

adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.

- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa dengan target 150 orang dan realisasi 184 orang sehingga capaian kinerja 122%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Pembinaan Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan dengan target 500 orang dan realisasi 500 orang sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pembinaan disiplin bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target 30 laporan dan realisasi 20 laporan sehingga capaian kinerja 66%. Faktor Keberhasilan Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN disebabkan beberapa hal antara lain :
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai ke semua ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep;
 - 2) Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar ASN yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.

- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani dengan target 30 Dokumen dan realisasi 11 dokumen sehingga capaian kinerja 37%. Faktor Keberhasilan Menurunnya Perceraian Pegawai disebabkan beberapa hal antara lain : Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menyediakan layanan konseling, salah satu layanannya adalah konseling pernikahan bagi ASN dan pasangannya yang mengajukan cerai, proses konseling merupakan wujud upaya mediasi bagi pasangan yang mengajukan ijin cerai, hal ini juga berdampak pada jumlah ijin perceraian ASN.
- Evaluasi Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan monitoring dan evaluasi disiplin pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.

c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 45% dan terealisasi 45% sehingga capaian kinerja dengan persentase 100%.

Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Kebijakan Teknis dan

Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik melalui jalur pendidikan maupun jalur pelatihan dari seluruh ASN di dilingkungan Pemkab Sumenep.

b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan Indikator Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan target 20 orang dan realisasi 12 Dokumen sehingga capaian kinerja 60%. Faktor Penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah karena adanya 1 (satu) orang peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengundurkan diri sebagai peserta diklat dengan Anggaran sebesar Rp. 21.375.000.

2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II, Administrator dan Pengawas dengan Pola Kontribusi/mengirim kemitraan dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur, serta Orientasi PPPK di lingkungan Pemkab Sumenep.

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan :											
1	Indeks Profesionalitas ASN			62	84	85	86	87	87,07	88	87	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			89,85	89,90	89,95	89,98	90,00	90,45	91	91	
	Indikator Sasaran :											
1	Indeks Penilaian Sistem Merit			0,45	0,66	0,70	0,73	0,77	0,64*	0,75	0,77	
2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	100	100	100	

Catatan :

* Hasil Realisasi Indeks Penilaian Sistem Merit menggunakan Hasil Penilaian KASN Tahun 2023 karena tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian oleh KASN

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2022
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	(Tahun n+2) 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan :											
1	Indeks Profesionalitas ASN			62	84	85	86	87	87,07	88	87	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			89,85	89,90	89,95	89,98	90,00	90,45	91	91	
	Indikator Sasaran :											
1	Indeks Penilaian Sistem Merit			0,45	0,66	0,70	0,73	0,77	0,64*	0,75	0,77	
2	Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN			70	80	83	84	85	78,92	84	85	
3	Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN)			15	32	33	35	36	33,00	35	36	
4	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	100	100	100	

Catatan :

* Hasil Realisasi Indeks Penilaian Sistem Merit menggunakan Hasil Penilaian KASN Tahun 2023 karena tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian oleh KASN

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 ditetapkan 84 dan terealisasi 87,07 dengan capaian indikatornya sebesar 102,43%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran untuk tahun 2023 yang baru dikeluarkan oleh BKN pada Bulan Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Surat dari BKN Kanreg II Surabaya Nomor : 414/B-AK.04/SD/KR.II/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Faktor Keberhasilan tercapainya indikator ini karena dipengaruhi adanya peningkatan nilai untuk Dimensi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja yang mengalami Kenaikan secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep profesional.
2. Indikator Kinerja Indeks Penilaian Sistem Merit tahun 2024 ditetapkan 0,70 dan terealisasi 0,64 dengan Capaian Indikatornya sebesar 91,43%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, untuk tahun 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara tidak melakukan Penilaian Sistem Merit. Faktor Penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah Tingginya persentase GAP pada masing-masing aspek, mengindikasikan implementasi aspek tersebut. Rendahnya tingkat maturitas instansi atas kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; dinamika yang terjadi di lapangan ditambah dengan keterbatasan bukti pendukung (evidence) atas implementasi seluruh Aspek Pelaksanaan Sistem Merit. Untuk mencapai target kinerja diatas, pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Berikut upaya-upaya yang dimaksud antara lain :

Tabel 2.4
Upaya-Upaya Dalam Peningkatan Sistem Merit

No.	ASPEK	Upaya Yang Telah di Lakukan
1	Perencanaan Kebutuhan	Menyusun Peta Jabatan yang disesuaikan Nomenklatur yang baru
2	Pengadaan	Melakukan evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS dalam kurun waktu 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan setelah pelatihan dasar dilaksanakan.
3	Pengembangan Karier	Membangun Talent pool untuk JPT, Administrator Pengawas dan Pelaksana
4	Promosi dan Mutasi	Telah melaksanakan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif dengan metode Assessment.

5	Manajemen Kinerja	1. Seluruh pegawai telah menyusun kontrak kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Organisasi; 2. Telah menggunakan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur bagi seluruh pegawai.
6	Penggajian, Penghargaan, dan Perlindungan	1. Hasil penilaian kinerja sudah menjadi bobot utama dalam pemberian TPP; 2. Mempunyai program untuk pemberian penghargaan bagi pegawai; 3. Mempunyai peraturan kode etik dan kodeperilaku
7	Perlindungan dan Pelayanan	Telah tersedia sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai.
8	Sistem Informasi	Telah mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian, dan sistem penilaian kinerja berbasis online;

3. Indikator Kinerja Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN tahun 2024 ditetapkan 83 dan terealisasi 78,92 dengan capaian indikatornya sebesar 95,08%. Faktor Penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah Tingginya persentase GAP pada masing-masing elemen, mengindikasikan implementasi elemen tersebut. Rendahnya tingkat maturitas instansi atas kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; dinamika yang terjadi di lapangan ditambah dengan keterbatasan bukti pendukung (evidence) atas implementasi seluruh elemen NSPK Manajemen ASN.
4. Indikator Kinerja Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) tahun 2024 ditetapkan 33 dan terealisasi 33,36 dengan capaian indikatornya sebesar 101,09%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran untuk tahun 2024 yang baru dikeluarkan oleh BKN pada Bulan Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Surat dari BKN Kanreg II Surabaya Nomor : 414/B-AK.04/SD/KR.II/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penambahan Data Pengembangan Kompetensi pada aplikasi SIASN. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan nilai dimaksud adalah kelengkapan data individu pada aplikasi SIASN, bahwa penilaian IP ASN dilakukan terhadap data SIASN dan isian data pada SIASN telah dilakukan penambahan data pengembangan kompetensi.

- b. Menghimbau kepada seluruh ASN untuk mengikuti Kegiatan ASN Belajar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Webinar ASN Belajar diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi bagi setiap PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir serta harus dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Setiap ASN dapat mengikuti Coaching dan Mentoring di masing-masing Perangkat Daerah.
5. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 ditetapkan 89,95 dan terealisasi 90,45 dengan Capaian Indikatornya sebesar 100,56%. Realisasi ini berdasarkan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Nomor : X.700.1.2.1/848/060.5/2024 tanggal 15 Juli 2024. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya komitmen dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dan seluruh Tim SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memenuhi segala aspek penilaian SAKIP Perangkat Daerah serta koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah koordinator SAKIP.
 - b. Telah disusunnya Pohon Kinerja (Pokin) Perangkat Daerah yang digunakan dalam dokumen perencanaan kinerja.
6. Untuk Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 ditetapkan 94,00 dan terealisasi 100,00 dengan Capaian Indikatornya sebesar 106,38%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja secara berkala;
 - b. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala atas capaian kinerja Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat baik. Hal ini karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan selalu melakukan perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Sumenep, masyarakat maupun pengguna layanan lainnya, antara lain:

1. Pelayanan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pelayanan proses administrasi penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Pelayanan Peninjauan Masa Kerja;
6. Pelayanan Penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
7. Pelayanan proses administrasi ijin belajar dan tugas belajar;
8. Pelayanan pemberian penghargaan (satya lencana) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan masa kerja;
9. Pelayanan fasilitasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
10. Pelayanan Data Pegawai Negeri Sipil;
11. Pelayanan proses administrasi Kartu Pegawai Negeri Sipil;

12. Pelayanan proses administrasi Penerbitan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
13. Fasilitasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS;
14. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundangundangan terkait kepegawaian;
15. Pembinaan kepegawaian, dan
16. Pelayanan administrasi lainnya terkait kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian dan monitoring secara berkala yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen dan pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian dengan instansi pusat (BKD Provinsi, BKN dan Menpan-RB) yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di bidang teknologi informasi;
- 2) Belum maksimalnya penerapan sistem merit sehingga penilaian kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa diukur berdasarkan kompetensi;
- 3) Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 4) Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir.

Hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kompetensi ASN, dimana pengembangan SDM yang membutuhkan sinkronisasi dengan perangkat daerah masing-masing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan penyelenggara diklat;
- 2) Data dan informasi kepegawaian belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan data dan informasi kepegawaian untuk mendukung perumusan setiap target output/outcome telah diupayakan, namun data dan informasi kepegawaian belum banyak dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan maupun strategi perencanaan kepegawaian. Upaya pengumpulan data dan informasi kepegawaian dalam satu sistem informasi untuk mendukung kebijakan “Satu Data” masih dalam proses identifikasi dan review struktur data. Dengan demikian, perlu adanya komitmen untuk penyempurnaan penyelenggaraan data dan informasi kepegawaian.
- 3) Konsistensi pendanaan dari perencanaan ke penganggaran yang perlu lebih dikendalikan. Keselarasan perencanaan kabupaten dengan PD dan penganggaran dapat dilihat melalui kesesuaian program, indikator program, target indikator program, kegiatan dan output kegiatan, namun dari aspek anggaran dapat terjadi perubahan, mengingat pada proses penetapan anggaran masih ada proses pembahasan dengan DPRD yang salah satunya memiliki fungsi budgeting, dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pergeseran anggaran baik pada proses perencanaan maupun proses pelaksanaan anggaran di tahun berjalan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki peluang dan tantangan yang dihadapi antara lain :

a. Faktor Peluang

1. Adanya kewenangan terkait kepegawaian, dimana peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting dan memiliki pengaruh besar dalam perencanaan penataan

pegawai, baik rotasi pegawai, promosi serta pengembangan kapasitas pegawai;

2. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi (e-SDM) untuk mendukung proses perencanaan dan monitoring. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi akan sangat bermanfaat untuk memantapkan proses penataan dan pengembangan kapasitas pegawai yang berkualitas serta meningkatkan fungsi monitoring dengan didukung oleh peran serta seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional;
4. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

b. Faktor Tantangan

1. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN

Upaya peningkatan Integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai ASN di lingkungan kinerja pemerintahan masing-masing sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan-peraturan lainnya. Aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian kaitannya dalam kompetensi aparatur adalah E 3 yaitu :

- a) Pemberdayaan (*empower*) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat.
- b) Pembelajaran (*educate*) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis.
- c) Pencerahan (*enlighten*) yaitu membuka wawasan aparatur sipil Negara untuk berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja organisasi.

3. Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator penyediaan data dan informasi kepegawaian perlu mengoptimalkan kualitas data dan informasi kepegawaian untuk kebutuhan penataan, promosi dan pengembangan kapasitas pegawai yang dipakai dalam perencanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.3.4 Isu-Isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian secara digital;
2. Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki;
3. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai;
4. Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem;
5. Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.3. berdasarkan tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep kecuali mengenai pagu penggunaan anggaran namun semua program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD Tahun 2026 (T-C.31).

Tabel 2.5 (T-C.31)
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 BKPSDM Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Ketentuan	100%	1.471.241.400	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Ketentuan	100%	1.471.241.400	
			Informasi Kepegawaian Yang Akurat	100%				Informasi Kepegawaian Yang Akurat	100%		
			Persentase ASN yang sesuai Jabatan	100%				Persentase ASN yang sesuai Jabatan	100%		
			Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	82%				Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	82%		
			Persentase ASN Yang Penilaian Kinerjanya Baik	93%				Persentase ASN Yang Penilaian Kinerjanya Baik	93%		
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan ASN	1 Laporan	400.091.000	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan ASN	1 Laporan	400.091.000	
			Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	100%				Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	100%		
			Jumlah Laporan Data Kepegawaian Yang Valid	1 Laporan				Jumlah Laporan Data Kepegawaian Yang Valid	1Laporan		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dokumen	16.120.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dokumen	16.120.000	

	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	116.684.000	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	116.684.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	30.774.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	30.774.000	
	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	59.797.000	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	59.797.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	102.909.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	102.909.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	73.807.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	73.807.000	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Mutasi dan Promosi yang sesuai Ketentuan	100%	592.549.500	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Mutasi dan Promosi yang sesuai Ketentuan	100%	592.549.500	
	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	204.485.100	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	204.485.100	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.000 Dokumen	74.242.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.000 Dokumen	74.242.800	
	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	313.821.600	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	313.821.600	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	228.614.900	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	228.614.900	

	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	141.294.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	141.294.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 orang	53.320.900	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 orang	53.320.900	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 dokumen	34.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 dokumen	34.000.000	
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase ASN Yang menyelesaikan Kinerja tepat waktu	93%	249.986.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase ASN Yang menyelesaikan Kinerja tepat waktu	93%	249.986.000	
			Persentase Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Yang Berkualitas	93%				Persentase Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Yang Berkualitas	93%		
			Persentase ASN Yang Disiplin	100%				Persentase ASN Yang Disiplin	100%		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	12.938.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	12.938.000	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	10.110.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	10.110.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2.300 orang	66.532.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2.300 orang	66.532.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 orang	12.994.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 orang	12.994.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 orang	71.640.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 orang	71.640.000	

	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	38.632.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	38.632.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	29.870.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	29.870.000	
	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	7.270.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	7.270.000	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Data Pengembangan Kompetensi Yang Akurat	90%	477.834.200	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Data Pengembangan Kompetensi Yang Akurat	90%	477.834.200	
			Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	58%				Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	58%		
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	15 orang	46.492.500	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	15 orang	46.492.500	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	11.892.500	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	11.892.500	

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	34.600.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	34.600.000	
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	6 Orang	431.341.700	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	6 Orang	431.341.700	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	424.329.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	424.329.200	
Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	7.012.500	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	7.012.500	

3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas	100%	11.795.412.675	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas	100%	11.795.412.675	
			Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang berjalan Efektif	88				Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang berjalan Efektif	88		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	1.210.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	1.210.000	
			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah > 80%	92%				Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah > 80%	92%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	810.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	810.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	400.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran	91,80%	10.183.339.271	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran	91,8%	10.183.339.271	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73/12 Orang/bulan	10.182.939.271	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73/12 Orang/bulan	10.182.939.271	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	400.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	259.734.075	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	259.734.075	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.957.260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.957.260	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.177.079	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.177.079	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.423.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.423.550	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.180.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.180.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	17.187.186	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	17.187.186	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.809.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.809.000	

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	7 unit	85.520.221	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	7 unit	85.520.221	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	85.520.221	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	85.520.221	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan	3 Jasa	989.771.028	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan	3 Jasa	989.771.028	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.595.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.595.100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	599.732.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	599.732.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	386.443.728	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	386.443.728	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Laporan	275.838.080	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Laporan	275.838.080	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	110.988.530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	110.988.530	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	164.849.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	164.849.550	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memiliki pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat dan tidak menyelenggarakan program serta kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Sumenep

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Nihil					



TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju;
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
4. Daya saing sumber Daya Manusia meningkat;
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*;

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putera puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui **8 (Delapan) Misi** yang dituangkan dalam Delapan **Asta Cita** sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ada 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Penyederhanaan Birokrasi.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”***.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban/tugas

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2026 Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. **Tujuan Pertama**, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi; (kalimat kinerja)
 - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan sumber daya air;
 - c. Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara.
 - d. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
2. **Tujuan Kedua**, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Menurunnya penduduk miskin perdesaan;
 - b. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - c. Menurunnya tingkat pengangguran;
3. **Tujuan Ketiga**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
 - c. Pelestarian nilai - nilai budaya lokal;
 - d. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan.
4. **Tujuan Keempat**, Mewujudkan pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas
 - b. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
 - c. Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi;
 - d. Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan administratif;
 - e. Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat.

5. **Tujuan Kelima**, mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya aksesibilitas ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi berkelanjutan;
 - c. Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Tujuan keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas.

Tema Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2026 adalah **“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Memperkuat Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil dan Merata”**. Dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Stabilisasi Kemandirian Masyarakat Dengan Menjaga Daya Beli Dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Sektor Unggulan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
2. Pemantapan Kesiapan Kompetensi Tenaga Kerja Terhadap Perkembangan Kebutuhan Pasar;
3. Pemantapan SDM Unggul, Mandiri dan Sejahtera Melalui Pemutakhiran Layanan Pendidikan dan Kesehatan Merata, Mudah, Terjangkau dan Berkualitas;
4. Stabilisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan Yang Berkualitas, Tertata Optimal dan Unggul Yang Berwawasan Lingkungan;
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Sosial Dan Politik Kabupaten Sumenep;
6. Meningkatnya Tata Kelola Yang Profesional, Akuntabel dan Berintegritas.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Meningkatnya Tata Kelola Yang Profesional, Akuntabel dan Berintegritas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirumuskan untuk mendukung peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional, maka **tujuan** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara** dengan **indikator Indeks Sistem Merit** dengan target untuk tahun 2026 adalah 0,78. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah. Bersama ini kami sampaikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029

NO.	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Terciptanya budaya birokrasi professional dan Melayani	Indeks Sistem Merit	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

No	Tujuan PD	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara		Indeks Sistem Merit	0,78
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	85
		Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	35,5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA (91,20)

BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan konsep program yang akan disusun dalam RPJMD dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Untuk mewujudkan kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, didukung dari dana APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 berpedoman kepada konsep Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan

pendanaan. Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah Kegiatan : - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; - Mutasi dan Promosi ASN; - Pengembangan Kompetensi ASN; - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; - Pengelolaan Data Kepegawaian; - Pengelolaan Mutasi ASN; - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; - Pengelolaan Promosi ASN; - Pengelolaan Assesment Center; - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional; - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; - Pembinaan Disiplin ASN; - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; - Evaluasi Disiplin ASN;

2.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi Teknis; 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; 3. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; 3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; 4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan; 5. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . 15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
--	--

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	Meningkatnya Tata Kelola Profesional, Akuntabel dan Berintegritas (PP 6)	Program Kepegawaian Daerah <i>Kegiatan :</i> 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; 2. Mutasi dan Promosi ASN; 3. Pengembangan Kompetensi ASN; 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. <i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; 4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; 5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; 6. Pengelolaan Data Kepegawaian; 7. Pengelolaan Mutasi ASN; 8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; 9. Pengelolaan Promosi ASN; 10. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; 11. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; 12. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional; 13. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 14. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 15. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; 16. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; 17. Pembinaan Disiplin ASN;	1.471.241.400 400.091.000 592.549.500 228.614.900 249.986.000 16.120.000 116.684.000 30.774.000 59.797.000 102.909.000 73.807.000 204.485.100 74.242.800 313.821.900 141.294.000 53.320.900 34.000.000 12.938.000 10.110.000 66.532.000 12.994.000 71.640.000	

		18. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	38.632.000	
		19. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;	29.870.000	
		20. Evaluasi Disiplin ASN.	7.270.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	477.834.200	
		<i>Kegiatan :</i>		
		1. Pengembangan Kompetensi Teknis;	46.492.500	
		2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;	431.341.700	
		<i>Sub Kegiatan :</i>		
		1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;	11.892.500	
		2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;	34.600.000	
		3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;	424.329.200	
		4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan;	7.012.500	

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program/kegiatan/sub kegiatan ditetapkan Indikator kinerja, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 (T-C.33).

TABEL 4.4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah						Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
	Kode		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A.	5	03					KEPEGAWAIAN								
I.	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Ketentuan	BKPSDM	100%	1.471.241.400	APBD		100%	1.485.953.814
								Informasi Kepegawaian Yang Akurat	BKPSDM	100%				100%	
								Persentase ASN yang sesuai Jabatan	BKPSDM	100%				100%	
								Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	82%				85%	
								Persentase ASN Yang Penilaian Kinerjanya Baik	BKPSDM	93%				93,5%	
1.	5	03	02	2.01			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan ASN	BKPSDM	1 Laporan	400.091.000	APBD		1 Laporan	404.091.910
								Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	BKPSDM	100%				100%	
								Jumlah Laporan Data Kepegawaian Yang Valid	BKPSDM	1 Laporan				1 Laporan	

	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	2 dokumen	16.120.000	APBD		2 dokumen	16.281.200
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	1 dokumen	116.684.000	APBD		1 dokumen	117.850.840
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	1 Dokumen	30.774.000	APBD		1 Dokumen	31.081.740
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	59.797.000	APBD		1 Lembaga	60.394.970
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	102.909.000	APBD		1 Dokumen	103.938.090
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	73.807.000	APBD		1 Dokumen	74.545.070
2.	5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi yang sesuai Ketentuan	BKPSDM	100%	592.549.500	APBD		100%	598.474.995
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	1 Dokumen	204.485.100	APBD		1 Dokumen	206.529.951
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	1.000 Dokumen	74.242.800	APBD		1.000 Dokumen	74.985.228
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	1 Dokumen	313.821.600	APBD		1 Dokumen	316.959.816
3.	5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	1 Laporan	228.614.900	APBD		1 Laporan	230.901.049
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	75 Orang	141.294.000	APBD		75 Orang	142.706.940

	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	BKPSDM	15 orang	53.320.900	APBD		15 orang	53.854.109
	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM	1 dokumen	34.000.000	APBD		1 dokumen	34.340.000
4.	5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang menyelesaikan Kinerja tepat waktu	BKPSDM	93%	249.986.000	APBD		93,5%	252.485.860
							Persentase Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Yang Berkualitas	BKPSDM	93%				93,5%	
							Persentase ASN Yang Disiplin	BKPSDM	100%				100%	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	12.938.000	APBD		1 Dokumen	13.067.380
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	2 Laporan	10.110.000	APBD		2 Laporan	10.211.100
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM	2.300 orang	66.532.000	APBD		2.290 orang	67.197.320
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	150 orang	12.994.000	APBD		155 orang	13.123.940
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	500 orang	71.640.000	APBD		505 orang	72.356.400
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	20 Laporan	38.632.000	APBD		20 Laporan	39.018.320
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM	20 Dokumen	29.870.000	APBD		20 Dokumen	30.168.700
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM	1 Laporan	7.270.000	APBD		1 Laporan	7.342.700

B.	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Data Pengembangan Kompetensi Yang Akurat	BKPSDM	90%	477.834.200	APBD		90,5%	482.612.542
							Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	BKPSDM	58%				61%	
1.	5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	BKPSDM	15 orang	46.492.500	APBD		16 orang	46.957.425
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM	1 Dokumen	11.892.500	APBD		1 Dokumen	12.011.425
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	15 Orang	34.600.000	APBD		16 orang	34.946.000
2.	5	04	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	BKPSDM	6 Orang	431.341.700	APBD		6 Orang	435.655.117
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	5 Laporan	424.329.200	APBD		5 Laporan	428.572.492

	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	BKPSDM	1 Dokumen	7.012.500	APBD		1 Dokumen	7.082.625
III.	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas	BKPSDM	100%	11.795.412.675	APBD		100%	11.913.366.802
							Nilai Kepuasan Layanan Administrasi yang berjalan Efektif	BKPSDM	88				88,5	
1	5	03	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun Tepat Waktu	BKPSDM	100%	1.210.000	APBD		100%	1.222.100
							Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah > 80%	BKPSDM	92%				93%	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	2 Dokumen	810.000	APBD		2 Dokumen	818.100
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	3 Laporan	400.000	APBD		3 Laporan	404.000
2	5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran	BKPSDM	91,8%	10.183.339.271	APBD		92%	10.285.172.664
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	73/12 Orang/ bulan	10.182.939.271	APBD		73/12 Orang/ bulan	10.284.768.664

	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	5 Laporan	400.000	APBD		5 Laporan	404.000
4	5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	BKPSDM	1 Laporan	259.734.075	APBD		1 Laporan	262.331.416
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	25.957.260	APBD		1 Paket	26.216.833
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	62.177.079	APBD		1 Paket	62.798.850
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	54.423.550	APBD		1 Paket	54.967.786
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	14.180.000	APBD		1 Paket	14.321.800
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM	7 Dokumen	17.187.186	APBD		7 Dokumen	17.359.058
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	12 Laporan	85.809.000	APBD		12 Laporan	86.667.090
5	5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	BKPSDM	7 unit	85.520.221	APBD		7 unit	86.375.423
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	7 unit	85.520.221	APBD		7 unit	86.375.423
6	5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan	BKPSDM	3 Jasa	989.771.028	APBD		3 Jasa	999.668.738
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Laporan	3.595.100	APBD		12 Laporan	3.631.051

	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	599.732.200	APBD		12 Laporan	605.729.522
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BKPSDM	12 Laporan	386.443.728	APBD		12 Laporan	390.308.165
7	5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	BKPSDM	1 Laporan	275.838.080	APBD		1 Laporan	278.596.461
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	13 Unit	110.988.530	APBD		13 Unit	112.098.415
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	2 Gedung	164.849.550	APBD		2 Gedung	166.498.046
JUMLAH TOTAL										13.744.488.275				13.881.933.158

BAB V



PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

- Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan revidi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sumenep dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur; dan
 6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Sumenep.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.

Sumenep, 12 Agustus 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010